



**PENINGKATAN KAPASITAS FUNGSI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN INOVASI DI DAERAH  
(Studi Kasus pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi  
Sulawesi Selatan)**

***CAPACITY BUILDING OF RESEARCH FUNCTION AND INNOVATION  
DEVELOPMENT IN THE REGION  
(Case Studies in Research and Development Agency of South Sulawesi)***

**Guntur Karnaeni**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara-Lembaga Administrasi Negara, Makassar.  
e-mail : gkarnaeni@gmail.com

**Abstrak**

Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya institusi/lembaga teknis yang memiliki kapasitas fungsi kelitbangan dalam rangka memadai dalam pelaksanaan dan peningkatan kualitas serta pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi daerah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis peningkatan kapasitas fungsi penelitian dan pengembangan inovasi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aspek sistem kebijakan pada dasarnya cukup memadai, namun masih terdapat kebijakan yang cenderung melemahkan kapasitas fungsi kelitbangan dan memerlukan penataan, penyempurnaan. Aspek organisasi/kelembagaan cukup memadai, namun masih terdapat permasalahan yang memerlukan penataan dan penguatan pada aspek struktur organisasi, sarana dan prasarana serta anggaran. Aspek sumber daya manusia cenderung sangat lemah dan tidak mencerminkan postur organisasi "techno-structure" atau lembaga teknis daerah. Adapun aspek fungsi kelitbangan masih lemah dengan indikasi kapasitas fungsi serap IPTEK belum diaktualisasikan, kapasitas fungsi penelitian dan pengembangan pada dasarnya sudah dilaksanakan namun masih belum maksimal, dan kapasitas fungsi diseminasi dan publikasi belum diaktualisasikan.

Kata kunci: Peningkatan Kapasitas, Pengembangan Kapasitas Organisasi, Penelitian dan Pengembangan Inovasi.

**Abstract**

*For the purposes of organizing governance and development, it is necessary to institutions / technical institute which has a capacity of research and development functions in order to adequately in implementing and improving the quality and utilization of kelitbangan and innovation area. This study aims to discuss and analyze the capacity of research and development functions of regional innovation with a focus on the case of Agency for Research and Development of South Sulawesi province in the position and function as a local technical institute in the field of research and development of regional innovation. This study used a qualitative approach with a*

*case study. Results of the study revealed that aspects of the policy system is basically adequate, but there are policies that tend to weaken the capacity of kelitbangan function and requires structuring, improvement. Aspects of the organization/institution are adequate, but there are still issues that need restructuring and strengthening the aspects of organizational structure, infrastructure and budget. Aspects of human resources tend to be very weak and do not reflect the posture of the organization "techno-structure" or a local technical institute. While aspects kelitbangan function is still weak with indications: the capacity of science and technology absorptive function has not been actualized, the capacity of research and development functions is basically already done, but still not up, and dissemination and publication functional capacity also yet actualized.*

*Keywords: Capacity Building, Organizational Capacity Development, Research and Development Innovation.*

## PENDAHULUAN

Penelitian dan pengembangan memiliki peranan penting dan diperlukan, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi, bisnis dan dunia usaha maupun untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, diperlukan lembaga teknis daerah yang memiliki kapasitas memadai dalam pelaksanaan dan peningkatan kualitas serta pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi daerah.

Peningkatan kapasitas instansi pemerintah daerah terkait dengan kebijakan pemerintah dan perlu dilakukan dalam rangka merespon tuntutan dan tantangan peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan publik. Pengembangan kapasitas fungsi kelitbangan dan inovasi pada Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, terkait dengan kebijakan pemerintah, antara lain Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan memiliki kapasitas fungsi kelitbangan dan berperan optimal dalam peningkatan kualitas dan kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan guna menunjang atau mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Selatan. Namun demikian, ditengarai bahwa Balitbangda Sulawesi Selatan belum optimal melaksanakan tugas dan fungsinya, karena adanya berbagai permasalahan yang tidak jauh berbeda atau bahkan sama dengan apa yang dialami oleh lembaga litbang lainnya.

Menurut Lakitan (2010), paling tidak ada tiga persoalan pokok terkait kinerja institusi litbang di Indonesia saat ini, yakni masih kurang atau lemahnya kontribusi dalam hal pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi belum memenuhi harapan, terutama terindikasi dari sedikitnya publikasi ilmiah dan paten yang dihasilkan, pembangunan perekonomian masih belum kentara, terutama terindikasi dari masih sangat terbatasnya teknologi domestik yang diadopsi dalam proses produksi barang atau jasa, dan masih sangat terbatas dalam menyediakan solusi bagi persoalan yang dihadapi pemerintah

daerah, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Persoalan pokok tersebut cenderung terjadi pada Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini fokus kepada aspek-aspek yang terkait pengembangan kapasitas fungsi kelitbangan pada Balitbangda Sulawesi Selatan untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan kapasitas fungsi kelitbangan dan inovasi daerah pada Balitbangda Sulawesi Selatan, meliputi aspek kebijakan dan sistem kelitbangan, organisasi/kelembagaan, sumber daya manusia; dan kapasitas program dan fungsi kelitbangan.

## METODE PENELITIAN

### Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Menurut Sugiono (2005:1) metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Data kolektif digunakan teknik triangulasi yang melalui analisis induktif dan kualitatif. Hasil penelitian menekankan makna dari pada generalisasi. Sementara Bungin (2003) merujuk pendapat Robert K. Yin yang menegaskan bahwa studi kasus lebih banyak terfokus pada upaya untuk menjawab pertanyaan “*how*” dan “*why*”, serta pada tingkat tertentu juga menjawab pertanyaan “*what*” dalam kegiatan penelitian.

### Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini meliputi dokumen, hasil observasi dan informan. Informan sebagai sumber data penelitian ini dipilih secara sengaja “*purposive*” yaitu: Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala dan

mantan Kepala Balitbangda Sulawesi Selatan, Pejabat struktural pada Balitbangda Sulawesi Selatan, Peneliti dan Perakayasa pada Balitbangda Sulawesi Selatan.

Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Prosedur validitasi data kualitatif menggunakan empat prinsip yakni *credibility*, *transferabilitas*, ketergantungan, dan kemantapan, sebagaimana pandangan Moleong (2000).

### Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data diolah dan dianalisis menggunakan beberapa teknik meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan membuat kesimpulan, sebagaimana pandangan Miles (1992).

## HASIL PENELITIAN

Penelitian peningkatan kapasitas fungsi kelitbangan dan inovasi daerah pada Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, fokus terhadap empat aspek yaitu: (a) sistem kebijakan, (b) organisasi/kelembagaan, (c) sumber daya manusia, dan (d) program dan fungsi kelitbangan, dengan hasil dan pembahasan sebagai berikut :

### Aspek Sistem Kebijakan Kelitbangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas sistim kebijakan, pada Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sejak dibentuknya tahun 2001 hingga saat ini telah berlangsung secara berkesinambungan dan cukup memadai, baik kebijakan yang sifatnya mendasar (*legal framework*) maupun kebijakan yang sifatnya mendukung (*supporting policies*), namun demikian masih terdapat kebijakan tertentu yang cenderung menghambat

dan bahkan melemahkan, dengan indikasi sebagai berikut: (a) adanya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2009 merupakan kebijakan dasar (*legal framework*) yang mengatur tentang penyempurnaan bentuk organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta rincian tugas pejabat struktural pada Balitbangda Sulawesi Selatan sebagai lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan pengembangan, (b) adanya kebijakan pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah (DRD) Sulawesi Selatan dan Tim Forum Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (FPPID) Sulawesi Selatan merupakan kebijakan pendukung (*supporting policies*) pengembangan kapasitas Balitbangda Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang kelitbang, (c) adanya kebijakan nasional tentang: (i) Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah, dan (ii) Sistem Inovasi Daerah (SIDa), diindikasikan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam pengembangan kapasitas lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan pengembangan, sedangkan (d) adanya kebijakan Kementerian Dalam Negeri tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan pada dasarnya merupakan kebijakan penguatan kapasitas pada Balitbangda Sulawesi Selatan, namun demikian kebijakan tersebut cenderung menghambat dan melemahkan posisi dan kedudukan Balitbangda dengan beberapa indikasi, antara lain (i) memposisikan Balitbangda sebagai sub ordinat Balitbang Kemendagri, (ii) membatasi ruang lingkup fokus program dan kegiatan kelitbang Balitbangda yaitu hanya dibidang pemerintahan umum, dan (iii) pengaturan sistim dan mekanisme penyelenggaraan program dan kegiatan sangat birokratis.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa aspek sistem kebijakan kelitbang pada Balitbangda Sulawesi Selatan telah dikembangkan secara berkesinambungan, namun demikian masih terdapat kebijakan yang memerlukan penataan, penyempurnaan sesuai dengan tuntutan dan tantangan tugas dan fungsi kelitbang dan inovasi daerah.

### **Aspek Organisasi/Kelembagaan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas Balitbangda Sulawesi Selatan pada aspek organisasi/kelembagaan sejak dibentuknya pada tahun 2001 hingga saat ini, dilihat dari segi struktur organisasi, prasarana dan sarana, sumber daya keuangan (anggaran), pada dasarnya telah dilaksanakan namun masih memiliki kekurangan dan kelemahan sehingga membutuhkan penataan dan penyempurnaan, dengan indikasi sebagai berikut: (a) struktur organisasi telah mencerminkan bentuk ideal sebagai organisasi "*techno-structure*", dengan tugas spesifik, memiliki unit pelaksana teknis badan (UPTB), unit dukungan teknis administratif bidang data dan informasi, inventarisasi dan publikasi, unit supporting yang menangani urusan umum, kepegawaian, keuangan dan program; (b) namun demikian, rumusan tugas dan fungsi penelitian, pengkajian dan pengembangan belum sepenuhnya tercermin dalam rumusan tugas dan fungsi bidang, secara eksplisit hanya menegaskan tugas dan fungsi penelitian dan pengkajian, sedangkan tugas dan fungsi pengembangan tidak diakomodir; (c) prasarana dan sarana secara umum kondisi dan keadaannya cukup memadai, namun dari segi kualitas dan kemanfaatan (terutama yang terkait dengan teknologi informasi) masih terbatas; (d) sumber daya keuangan (anggaran) dari segi angka prosentase pagu anggaran badan dari

tahun 2010–2013 relatif sangat kecil, hanya rata-rata 0,3 % dari total anggaran APBD provinsi; (e) anggaran belanja tahun 2010–2013, terdiri dari anggaran belanja langsung rata-rata 64,55 % dan anggaran belanja tidak langsung hanya rata-rata 35,45 % dari total pagu anggaran.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan kapasitas fungsi kelitbangan dan inovasi pada Balitbangda Sulawesi Selatan dari aspek atau dimensi organisasi/kelembagaan telah dilaksanakan secara berkesinambungan, namun demikian masih terdapat adanya permasalahan yang memerlukan penataan dan penguatan berbagai aspek terutama struktur organisasi, sarana dan prasarana dan sumber daya keuangan (anggaran) sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan tantangan tugas dan fungsi bidang kelitbangan dan inovasi daerah.

#### **Aspek Sumber Daya Manusia**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas fungsi kelitbangan pada Balitbangda Sulawesi Selatan dari aspek Sumber Daya Manusia cenderung belum dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat melemahkan kapasitas fungsi organisasi, dengan gambaran sebagai berikut: (a) kapasitas sumber daya manusia berdasarkan jumlah dan kualifikasi pendidikan relatif cukup memadai, sebanyak 42 orang (79,25 %) lulusan pendidikan tinggi (S1, S2 dan S3), sebanyak 2 orang (3,80 %) diploma dan sarjana muda, sementara 9 orang (20,93 %) tamatan SLTA; (b) kapasitas sumber daya manusia berdasarkan kepangkatan dan golongan cukup memadai, karena secara proporsional sesuai kebutuhan susunan dan komponen organisasi, yaitu PNS golongan IV sebanyak 17 orang, golongan III sebanyak 26 orang sedangkan golongan II sebanyak 10 orang. (c) sedangkan kapasitas sumber

daya manusia berdasarkan kelompok jabatan sangat timpang dan tidak proporsional, dari 53 SDM yang ada, sebanyak 17 orang (32,10 %) pejabat struktural, sebanyak 35 orang (66,04 %) pejabat fungsional umum, sedangkan pejabat fungsional peneliti/perekayasa sama sekali tidak ada ( 0 %) dari total SDM yang ada.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan kapasitas fungsi kelitbangan dan inovasi daerah pada Balitbangda Sulawesi Selatan dari aspek Sumber Daya Manusia belum dilaksanakan secara optimal dengan indikasi potensi dan kapasitas SDM yang dimiliki sangat lemah dan tidak mencerminkan postur organisasi “*techno-structure*” atau lembaga teknis daerah, sehingga dipastikan mengakibatkan lemahnya pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang penelitian, pengkajian dan pengembangan.

#### **Aspek Program Kelitbangan dan Inovasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas pada Balitbangda Sulawesi Selatan dari dimensi/aspek/tingkatan program/fungsi kelitbangan cenderung belum dilaksanakan secara maksimal, bahkan mengindikasikan lemahnya kapasitas organisasi, dengan gambaran sebagai berikut:

- a. program jangka menengah yang ditegaskan dalam Rencana Strategik 2009-2013 meliputi adanya 6 program kelitbangan yaitu: (1) Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat, (2) Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat, (3) Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Perwujudan Keunggulan Lokal untuk Memicu Laju Pertumbuhan Ekonomi, (4)

- Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Mewujudkan Sulsel sebagai Entitas Sosial Ekonomi yang berdikari, (5) Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Penguatan Kelembagaan Pemerintah, dan (6) Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Penciptaan Lingkungan Kondusif bagi Kehidupan Sosial;
- b. kapasitas fungsi *sourcing capacity* belum diwujudkan dengan indikasi: (1) program kerja dan kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan belum menggambarkan fungsi *sourcing capacity*, (2) masih terbatasnya aksesibilitas ke berbagai sumber informasi sains dan teknologi, (3) pengendalian terjadinya tumpang tindih riset yang dilakukan dengan riset yang (telah) dilakukan di tempat lain belum dilaksanakan, serta (4) peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya riset dalam menghasilkan teknologi yang bermanfaat belum dapat diwujudkan;
  - c. kapasitas fungsi penelitian dan pengembangan teknologi (*riset and development capacity*) cukup memadai, dengan indikasi program dan kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan memiliki relevansi dengan kebutuhan nyata pemerintah daerah, namun demikian masih diperhadapkan pada adanya permasalahan keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran;
  - d. kapasitas fungsi diseminasi hasil litbang (*disseminating capacity*) belum dilaksanakan secara optimal, dengan indikasi masih terbatasnya intensitas dan jangkauan publikasi kegiatan riset yang dilakukan dan teknologi yang dihasilkan baik melalui media cetak maupun elektronik, kuantitas dan kualitas teknologi yang diadopsi oleh pihak pengguna.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan kapasitas fungsi kelitbangan dan inovasi pada Balitbangda Sulawesi dari aspek program kelitbangan belum dilaksanakan secara optimal dengan indikasi: (i) kapasitas fungsi *sourcing capacity* belum diaktualisasikan, (ii) kapasitas fungsi penelitian dan pengembangan (*riset and development capacity*) pada dasarnya sudah dilaksanakan namun masih belum optimal, dan (iii) kapasitas fungsi *disseminating capacity* juga belum diaktualisasikan.

## PEMBAHASAN

### Aspek Sistem Kebijakan Kelitbangan

Aspek sistem kebijakan kelitbangan pada Balitbangda Sulawesi Selatan telah dikembangkan secara berkesinambungan, namun demikian masih terdapat kebijakan yang memerlukan penataan, penyempurnaan sesuai dengan tuntutan dan tantangan tugas dan fungsi kelitbangan dan inovasi daerah.

Menurut hasil identifikasi Keban (2010), dimensi kebijakan merupakan salah satu dimensi utama program pengembangan kemampuan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Dimensi kebijakan, meliputi perencanaan strategik dan analisis kebijakan publik. Sedangkan, Eade (1998) menyebutkan bahwa *system (sistem kerja/mekanisme kerja/prosedur kerja)* merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan internal organisasi melalui perubahan rancangan prosedur kerja.

Hal tersebut sejalan pula dengan pandangan Milen (2006) menyatakan, kapasitas organisasi pada tingkatan sistem/kebijakan, suatu organisasi harus melakukan upaya proses perbaikan pada sistem, kebijakan dan berbagai aturan

yang menjadi dasar program, aktivitas dan kegiatan pada organisasi. Dalam mengembangkan kualitas dan kapasitas sistem ini, yang menjadi fokus utama adalah perubahan pada kebijakan dan peraturan yang dianggap menghambat kinerja optimal organisasi.

### Aspek Organisasi/Kelembagaan

Pengembangan kapasitas fungsi kelitbangan dan inovasi pada Balitbangda Sulawesi Selatan dari aspek atau dimensi organisasi/kelembagaan telah dilaksanakan secara berkesinambungan, namun demikian masih terdapat adanya permasalahan yang memerlukan penataan dan penguatan berbagai aspek terutama struktur organisasi, sarana dan prasarana dan sumber daya keuangan (anggaran) sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan tantangan tugas dan fungsi bidang kelitbangan dan inovasi daerah.

Menurut Grindle (1997) penguatan kapasitas organisasi merupakan salah satu dimensi utama dalam strategi *capacity building* untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas organisasi. Sejalan dengan itu, Djatmiko (2004) merujuk pendapat Leavit yang menyatakan bahwa perubahan atau pengembangan kapasitas organisasi dilakukan dengan pendekatan, antara lain pendekatan struktural yang penekanannya dititik beratkan pada perubahan struktur kelembagaan organisasi. Sedangkan Eade (1998) berpendapat bahwa pengembangan internal organisasi antara lain melalui pendekatan: (a) struktur organisasi, yaitu perubahan struktur kelembagaan organisasi, (b) sarana dan prasarana, melalui pemanfaatan dan penggunaan teknologi sebagai sarana dan prasarana dalam melaksanakan pekerjaan, dan (c) sumber daya finansial/anggaran melalui alokasi sumber daya keuangan yang memadai sesuai kebutuhan, termasuk pemberian imbalan/insentif.

### Aspek Sumber Daya Manusia

Pengembangan kapasitas fungsi kelitbangan dan inovasi daerah pada Balitbangda Sulawesi Selatan dari aspek Sumber Daya Manusia belum dilaksanakan secara optimal dengan indikasi potensi dan kapasitas SDM yang dimiliki sangat lemah dan tidak mencerminkan postur organisasi "*techno-structure*" atau lembaga teknis daerah, sehingga dipastikan mengakibatkan lemahnya pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang penelitian, pengkajian dan pengembangan.

Menurut Milen (2006) yang merujuk klasifikasi GTZ (*Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit*), menyatakan bahwa pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme individu dalam melaksanakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Senada dengan itu, Djatmiko (2004) mengatakan bahwa program pengembangan kapasitas yang disusun harus menggunakan metode yang dirancang untuk mengubah pengetahuan, keahlian, sikap dan perilaku.

Hal ini mengindikasikan bahwa penekanan utama yang dilakukan dalam rangka pengembangan kapasitas organisasi ditujukan kepada upaya untuk merubah individu-individu yang ada didalam organisasi, sehingga akan merubah organisasi dengan didukung oleh sumber daya lain yang ada di dalam organisasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia merupakan dimensi/aspek/tingkatan utama dalam pendekatan atau strategi *capacity building* untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas organisasi.

## Aspek Program Kelitbangan dan Inovasi

Pengembangan kapasitas fungsi kelitbangan dan inovasi pada Balitbangda Sulawesi dari aspek program kelitbangan belum dilaksanakan secara optimal dengan indikasi: (i) kapasitas fungsi *sourcing capacity* belum diaktualisasikan, (ii) kapasitas fungsi penelitian dan pengembangan (*riset and development capacity*) pada dasarnya sudah dilaksanakan namun masih belum optimal, dan (iii) kapasitas fungsi *disseminating capacity* juga belum diaktualisasikan.

Metode yang dipakai dalam kegiatan litbang biasanya menggunakan teknik riset ilmiah yang standar tanpa mengharapkan hasil yang pasti (*bentuk riset ilmiah murni*) atau untuk mendapatkan prakiraan hasil yang memiliki kemanfaatan secara nyata. Kapasitas program atau fungsi kelitbangan dalam pengembangan kapasitas Balitbangda Sulawesi Selatan diklasifikasikan sebagai aspek/dimensi utama dan terkait dengan aspek/dimensi sistim kebijakan, organisasi/kelembagaan dan sumber daya manusia.

Menurut Lakitan (2010) sebuah institusi litbang idealnya memiliki kapasitas program dan fungsi sangat mendasar yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi lembaga kelitbangan, yakni: (1) kapasitas untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari luar (*sourcing capacity*); (2) kapasitas untuk melakukan riset dan mengembangkan teknologi (*research and development capacity*); dan (3) kapasitas untuk mendiseminasikan pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan (*disseminating capacity*).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis menyimpulkan bahwa pengembangan kapasitas fungsi kelitbangan dan inovasi daerah pada Balitbangda Sulawesi Selatan secara umum telah dilaksanakan namun diindikasikan masih adanya berbagai permasalahan yang cukup berpotensi menghambat dan bahkan melemahkan fungsi kelitbangan dan inovasi daerah. Di samping itu, penelitian ini membuktikan asumsi bahwa bahwa sistim kebijakan kelitbangan, kapasitas organisasi/kelembagaan dan sumber daya manusia mempengaruhi kapasitas fungsi kelitbangan dan inovasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa pengembangan kapasitas fungsi kelitbangan dan inovasi daerah pada Balitbangda provinsi Sulawesi Selatan hendaknya melakukan: (a) penyempurnaan sistim kebijakan kelitbangan, (b) revitalisasi organisasi/kelembagaan, dan (c) pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta (d) pengembangan program untuk penguatan kapasitas fungsi kelitbangan dan inovasi daerah terutama daya serap pengetahuan dan teknologi, penelitian dan pengembangan, dan diseminasi hasil litbang dan inovasi daerah.



**REFERENSI**

- Bungin, Burhan, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta; RajaGrafindo Persada.
- Djarmiko, YH. 2004. Prilaku Organisasi. Bandung: Alfabeta
- Eade, D. 1998 capacity Building: An Approach to People-Centred Development, Oxford, UK: Oxfam, GB.
- Keban, Yermias. T. 2010. Isu Capacity Building dan Good Governance dalam Reformasi Birokrasi. Yogyakarta: Fisip UGM.
- Lakitan, Benjamin. Revitalisasi Kelembagaan R & D untuk Mendukung Sistem Inovasi Nasional, Bahan keynote speech pada seminar Revitalisasi Kelembagaan Litbang yang diselenggarakan di Pascasarjana Universitas Sahid, Jakarta, 23 November 2010.
- Milen, Anelli, 2006. Capacity Building: Meningkatkan Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
- Grindle, Merilee S, (editor), 1997. Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries, Boston, MA: Harvard Institute for International Development.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.
- Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.